

Anggaran Pilwalkot Makassar Rp78 miliar



Sumber gambar: www.tuntasonline.com

Makassar: Pemerintah Kota Makassar bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar menyepakati anggaran penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Makassar (Pilwalkot) 2019 sebesar Rp78 miliar. Jumlah itu tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani kedua pihak.

“KPU Makassar sudah melakukan penyesuaian dan pengurangan dari jumlah pengajuan awal Rp96 Miliar menjadi Rp78 Miliar. Itu sudah melalui pembahasan yang cukup alot,” kata Komisioner KPU Kota Makassar, Gunawan Mashar di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa malam, 1 Oktober 2019.

Gunawan menjelaskan bahwa pengurangan tersebut untuk menyesuaikan antara kebutuhan KPU dan kesanggupan Pemkot Makassar. Sehingga beberapa yang dianggap penting harus mengalami pengurangan yang cukup jauh dari proyeksi awal.

“Kita memangkas biaya sosialisasi dari semula Rp10 miliar menjadi Rp3 miliar, menghilangkan anggaran PSU yang sebenarnya sangat krusial, mengurangi jumlah TPS, dan memotong anggaran pencalonan, dan lain-lain,” jelas Gunawan.

Namun menurut Gunawan pihaknya tetap masih mempertahankan anggaran bagi elementer yang dianggap krusial. Karena jika dana atau anggaran untuk itu dikurangi maka kemungkinan berdampak pada kualitas penyelenggaraan Pilwalkot nantinya.

“Kami tetap mempertahankan anggaran yang elementer, yang tidak bisa dikurangi karena bisa berdampak pada kualitas penyelenggaraan Pilkada, seperti di data, penyelenggaraan teknis, dan logistik,” jelasnya.

Gunawan mencontohkan jika mengurangi anggaran Bimtek di berbagai tingkat seperti PPS dan KPPS akan berdampak pada lemahnya pemahaman penyelenggara *adhoc*. Sama halnya jika

mengurangi anggaran pemutakhiran data. “Itu bisa berimbas pada efektifitas petugas lapangan. Begitu pula dengan mengurangi biaya logistik berpengaruh pada ketersediaan dan kualitas logistik,” jelasnya.

Dari jumlah Rp78 miliar, secara garis besar porsi terbesar pada honorarium penyelenggara *adhoc*, sekitar Rp20,9 miliar. Lalu pengadaan dan distribusi logistik sekitar Rp8 miliar, untuk sosialisasi Rp3 miliar, dan untuk pemutakhiran data sebesar Rp5,5 miliar.

Sumber Berita:

1. www.medcom.id, Anggaran Pilwalkot Makassar Rp78 miliar, Rabu, 2 Oktober 2019.
2. Koran Fajar, Anggaran Pilwalkot Tambah Rp20 M,” Senin, 7 Oktober 2019.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, diatur mengenai Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019, dinyatakan bahwa Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.

Dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019, dinyatakan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.